ISTIHSAN DALAM LITERATUR SYAFI'YAH (TELAAH ISTIHSAN DALAM KITAB AI-MUSTAŞFA AI-GHAZALI)

Wardatun Nabilah,¹ Arifki Budia Warman², Nurul 'Aini Octavia³

¹ Institut Agama Islam Negeri, Batusangkar
e-mail: wardatunnabilah@iainbatusangkar.ac.id

² Institut Agama Islam Negeri, Batusangkar
e-mail: arifkibudiawarman@iainbukittinggi.ac.id

³ Institut Agama Islam Negeri, Batusangkar
e-mail: nurulainioctavia@iainbatusangkar.ac.id

Submit: 05-05-2021

Direvisi: 20-05-2021

Dipublish: 21-06-2021

Abstract: *This article aims to examine the reasons for the views of Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali in the Kitab of Al-Mustaşfa min 'Ilmi Ushul which classifies Istihsan into the Maubum argument (the argument that is admired). Istihsan is one of the ijthad methods disputed by the scholars, although in reality, all scholars use it practically. Basically, the scholars use Istihsan in lughawi (language), which is "to do something better". But in terms of the term (which usually applies), scholars differ due to differences in understanding and defining "Istihsan". The method used is a qualitative method with a library research approach, with the finding that follows the best here (حسن) is the best from the propositions that have been revealed by Allah, not the best according to the inclination of reason alone. Furthermore, the argument that emerges inexplicably cannot be known whether it is imaginary or really exists. So that argument must be real, by taking it from the argument of Sharia, so that it appears real when he justifies or blames. So then, it is better to cancel Istihsan.*

Kata kunci: Istihsan, al-Mustaşfa, Syafi'iyah.

PENDAHULUAN

Istihsan termasuk kepada salah satu bentuk metode penetapan hukum yang diperselisihkan ulama ushul, sekalipun secara praktek metode ini tetap digunakan. Secara prinsip, ulama menerapkan Istihsan dalam tataran konteks pengertian Istihsan secara bahasa yang bermakna "berbuat sesuatu yang lebih baik". Akan tetapi, dalam konteks terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam memahami Istihsan antara golongan ulama yang menggunakan metode ijthad Istihsan dengan golongan yang tidak menggunakannya (menolak). Apabila para ulama sepakat dalam meletakkan indikator definisi Istihsan, niscaya perbedaan pendapat dalam memposisikan

Istihsan sebagai salah satu metode ijthad hukum Islam, dapat dihindari. (Syarifuddin, 2011: 324)

Istihsan memiliki beberapa pengertian yang dirumuskan oleh beberapa ulama. Di antara bentuk Istihsan, terdapat pola yang dapat diterima semua pihak dan mempunyai kekuatan dalam berijtihad; yakni Istihsan dalam makna "mengamalkan dalil yang terkuat di antara dua dalil yang ada". Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu al-Subki. (Al-Syatibiy, 1997: 197) Sedangkan Istihsan dalam pengertian "berpindahnya qiyas jaiil kepada qiyas khafi atau beralihnya dalil kepada adat kebiasaan", maka pengertian ini termasuk kepada ranah Istihsan yang diperdebatkan. Oleh karena itu,

kekuatannya dalam menjadi dalil pun kurang. Ulama yang termasuk menolak Istihsan dari sisi ini adalah Imam al-Syafi'i.

Penolakan Imam Syafi'i terhadap Istihsan ini terdapat dalam kitabnya al-Risalah, sewaktu ditanya, "Apakah anda membolehkan seseorang berkata 'lakukanlah istihsan tanpa menggunakan qiyas'? Ia menjawab: "Tidak boleh". (Al-Syafi'i, 2005: 494). Masih di dalam kitab al-Risalah, Imam Syafi'i menyatakan bahwa haram bagi seseorang yang memutuskan hukum dengan jalan Istihsan apabila ia menyalahi khabar. Selain itu, juga tidak dibenarkan jika seorang mujtahid berkata bahwa ia beristihsan dengan qiyas. Seandainya boleh mengenyampingkan qiyas, maka boleh pula bagi orang yang tidak berilmu dan mengutamakan akal semata untuk mengatakan sesuatu yang tidak berdasarkan kepada khabar dan sekedar menggunakan Istihsan. Istihsan adalah jalan *talazzuz* atau seenaknya. (Al-Syafi'i, 2005: 503-507)

Dari pernyataan Imam Syafi' di atas, didapatkan kesimpulan bahwa salah satu alasan penolakannya kepada Istihsan adalah karena Istihsan adalah metode penetapan hukum yang tidak bersumber dari *al-khabar* atau salah satu dari dalil syara', yakni al-quran, sunnah Rasulullah, ijma' dan qiyas. Apabila hal tersebut dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa mujtahid tersebut hanya menggunakan akal dan perasaannya saja dalam menetapkan hukum. Maka dalil tersebut tertolak. (Jainuddin, 2017: 75)

Salah seorang ulama yang mengomentari istihsan dalam literatur syafi'iyah adalah Imam Al-Ghazali dalam karya beliau, kitab *al-Mushtashfa*. Istihsan dalam kitab *al-Mushtashfa*,

termasuk dalil yang tidak dapat dijadikan sumber dalam menetapkan hukum Islam, meski banyak ulama yang memasukkan keempat kategori dalil ini sebagai sumber hukum selain *Syar'u Man Qablana*, *Qaul al-Shahaby* dan *Istihslah*. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan meneliti bagaimana pemakaian Istihsan sebagai metode penetapan hukum Islam dalam pandangan pengikut mazhab Syafi'i yang akan penulis analisa dari literatur ushul fiqh Imam al-Ghazali, yakni Istihsan dalam kitab *al-Mushtashfa*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah mencari dan mencatat bahan kepustakaan untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan masalah yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan menyusun dan mengklafisikasi bahan dan menarasikan sesuai kebutuhan dalam pembahasan.

TINJAUAN UMUM ISTIHSAN

Secara etimologis (bahasa) Istihsan dapat diartikan; "memperhitungkan atau mengikuti atau mencari sesuatu yang lebih baik karena memang disuruh untuk itu". Dari makna kebahasaan di atas dapat dipahami bahwa Istihsan terjadi ketika terdapat suatu kondisi dimana seseorang menghadapi dua hal yang keduanya baik, namun terdapat suatu hal lain yang menyebabkannya mesti meninggalkan salah satu di antara dua hal tersebut dan menetapkan untuk mengambil yang satu lagi, karena itulah yang dianggapnya

lebih baik untuk diamalkan. Adapun pengertian Istihsan dalam ranah terminologi, terdapat beberapa definisi yang dirumuskan ulama ushul. Beberapa definisi tersebut mengandung perbedaan makna akibat adanya perbedaan titik pandang. Ada juga definisi yang disepakati, namun ada pula di antaranya definisi yang diperselisihkan, sehingga menjadi berbeda dalam pengamalannya. (Syarifuddin, 2011: 325)

1. Ibnu Subki mengajukan rumusan definisi, yaitu:

عُدُولٌ عَنْ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى مِنْهُ

“Beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat dari padanya (qiyas pertama)”. (Al-Subki n.d.: 190)

2. Istilah Istihsan di kalangan ulama Malikiyah di antaranya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syathibi (salah seorang pakar Malikiyah).

وَ هُوَ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ الْأَخْذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مُقَابَلَةِ دَلِيلٍ كَلِّيٍّ

Dalam mazhab Maliki, Istihsan adalah mengganti masalah yang bersifat umum (kulliy) kepada masalah yang bersifat khusus (juziy). (Al-Syatibiy, 1997 : 194)

Beberapa pengertian Istihsan di atas, mengindikasikan bahwa dalam rangka menetapkan sebuah hukum, pada prinsipnya seorang mujtahid mesti berpegang dan berpatokan kepada dalil yang umum. Namun dalam cara kerja Istihsan, seorang mujtahid meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh *syara'* dan menetapkan hukum lain karena terdapat dalil lain yang lebih cocok dan lebih kuat. Hal itu dilakukan baik dengan cara meninggalkan *qiyas jaliy* kepada *qiyas khafiy* sebagai sumber hukum atau

menetapkan suatu hukum dengan cara mengambil persoalan yang bersifat khusus daripada persoalan yang bersifat umum karena ada kemaslahatan padanya. (Habibullah, 2016: 454)

Perbedaan pendapat ulama mengenai penggunaan Istihsan sebagai dalil hukum cukup besar. Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat Istihsan dapat digunakan sebagai dalil sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Zhahiriyah, Mu'tazilah dan Syi'ah mengatakan bahwa Istihsan tidak dapat dijadikan dalil hukum. Telah dijelaskan bahwa Imam Syafi'i menentang penggunaan Istihsan sebagai dalil karena jika hal itu dilakukan oleh seorang mujtahid, maka ia sama saja dengan pembuat syariat. Padahal yang membuat syariat hanyalah Allah SWT. Ber-Istihsan hanya disebut mengikuti hawa nafsu dan bersenang-senang atas dasar pertimbangan akal dan kecenderungan perasaan seseorang. Jelas saja perbuatan ini tertolak. Sebaliknya, Syekh Muhammad al-Khudari dari kalangan ulama Hanafiyah menyanggah dan menyatakan bahwa Istihsan bukan semata sebuah perkataan hukum yang berdasarkan hawa nafsu. Bahkan, Istihsan yang digunakan oleh kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah adalah dalil qiyas yang menyanggah dalil qiyas yang lainnya. Dalam konteks ini yang akan digali lebih lanjut dalam pembahasan adalah sejalan dengan dengan pernyataan Imam Ghazali dari kalangan ulama Syafi'iyah bahwa wujud Istihsan ini (pengalihan bentuk qiyas) adalah hal yang tidak diingkari oleh semua kalangan ulama, namun pengingkarannya terletak pada segi lafaz istilah penamaan dan pengkhususan jenis

dalil ini dalam sebutan istihsan. (Noorwahidah, 2017: 17)

ISTIHSAN DALAM KITAB AL-MUSTAŞFA AL-GHAZALI

1. Biografi al-Ghazali

Nama lengkap al-Ghazali adalah Abu Hamid Hujjatul Islam Zainuddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Thusi al-Ghazali al-Syafi'i (Al-Ghazali, 1993: 9). Ia dilahirkan di kota Thus, Khurasan (kira-kira 10 mil dari Naisabur) pada tahun 450 H (Abbas, 2011: 100). Ayah Imam al-Ghazali adalah seorang penjual benang wol di Kota Thus. Ia orang taat beragama dan wara' serta sangat mencintai ilmu dan ahli fiqih. Di waktu senggangnya ia menghadiri majelis pengajian dan mendalami ilmu agama di sana dan sangat berharap agar memiliki keturunan seperti para ulama, hingga Allah mengabulkan do'anya.

Ketika ayahnya wafat, Imam al-Ghazali diberi wasiat untuk terus menuntut ilmu pengetahuan. Imam al-Ghazali adalah orang yang sangat antusias dalam mendalami ilmu pengetahuan sejak usia muda. Diawali dengan belajar bahasa arab dan ilmu fiqih di Kota Thus, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jurjan untuk mendalami ushul fiqih. Tidak hanya sampai disitu, perjalanan mencari ilmu dilanjutkan ke Naisabur untuk berguru kepada al-Haramain al-Ma'aliy al-Juwaini hingga wafatnya al-Juwaini pada 478 H (bertepatan dengan 1085 M). Perjalanan diteruskan ke Baghdad untuk bertemu Wazir Nizham al-Mulk dan Imam al-Ghazali diangkat menjadi guru pada tahun 483 H disana. Amanah ini

dilakukan dengan sangat baik sehingga kala itu Imam al-Ghazali pun menjadi referensi utama dalam ilmu pengetahuan. Meski sudah menyandang predikat guru besar di zamannya, namun kehampaan diri mengantarkan Imam al-Ghazali untuk mendalami kehidupan sufi. Hingga pada 488 H, Imam al-Ghazali berangkat menuju Syiria dan dilanjutkan ke Baitul Maqdis, Palestina untuk merenung, membaca dan menulis. Bahkan setelah menunaikan ibadah haji dan sempat singgah di Iskandariah, Mesir, Imam al-Ghazali kembali ke kota Thus; kota kelahirannya untuk berkhalwat dan beribadah dalam kurun waktu 12 tahun hingga terbitlah karya besarnya *Ihya' Ulum al-Din*. Imam al-Ghazali sempat kembali mengajar sekitar dua tahun setelah itu di Naisabur, namun kembali pulang ke Kota Thus dan wafat pada 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M. (Fahlefi, 2012: 23-24)

Berikut adalah guru al-Ghazali yang terkenal :

- a) Abu Qasim Isma'ily (fiqih, Jarjan)
- b) Abu Ma'aly al-Juwayni (fiqih, Juwaini, Naysabur)
- c) Al-Faramazy (Tasauf, Thusi)
- d) Nasrul Muqaddas (Hadis, Baitul Maqdis)
- e) Abu Fatyan Ruasiy (Hadis).

Adapun karangan Imam Ghazali dalam bidang ushul fiqih adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Mankhul min ta'liqaati al-ushul (karangan pertama Ghazali dalam ushul fiqih)
- 2) Syifaaul Ghalil fi Bayani al-Syubhi wa al-Mukhayyal wa Masaliku al-Ta'lil
- 3) Taushibul Mujtahid
- 4) Asaasu al-Qiyaas
- 5) Haqiqatu al-Qaulaani
- 6) Tahdziibu al-Ushul

7) Mustashfa min Ilmi Ushul (Al-Ghazali, 1993: 14)

2. Dalil Mauhum (Dalil Yang Dikeragui) dalam Kitab al-Mustashfa al-Ghazali

Pembahasan Istihsan dalam kitab *al-Mustashfa* al-Ghazali termasuk ke dalam bab dalil yang dikeragui (*mauhum*). Ada empat macam sumber hukum (dalil) yang menurut Imam al-Ghazali termasuk dalil yang tidak dapat dijadikan sumber dalam menetapkan hukum Islam, meski banyak ulama yang memasukkan keempat kategori dalil ini sebagai sumber hukum. Sebelum membahas secara mendalam mengenai Istihsan yang ada di dalam kitab al-Mustashfa ini, penulis terlebih dahulu juga mencantumkan sedikit pembahasan ketiga dalil lain yang juga termasuk *dalil mauhum* (dalil yang dikeragui) dalam kitab ini.

a. Syar'u Man Qablana

Permasalahan terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat apakah Nabi Muhammad SAW mengikuti syari'at nabi sebelumnya dalam menjalankan ibadah atau tidak. Sebagian kalangan ulama menyatakan bahwa Nabi SAW mengikuti syari'at Nabi terdahulu, namun sebagian lagi mengatakan tidak. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa *syar'u man qablana* dapat dijadikan sumber hukum selama tidak dinasakh (dihapus) oleh syari'at Nabi Muhammad SAW. Karena syari'at nabi sebelumnya tetap merupakan syari'at yang diturunkan Allah kepada utusan-Nya. Pendapat ini dipegang oleh sebagian besar ulama Hanafiyah dan sebagian dari golongan Malikiyah dan Syafi'iyah. (Bakar, 2019: 93)

Namun di dalam kitab *al-Mustashfa*, al-Ghazali mengungkapkan setidaknya

ada empat alasan yang menyebabkan mengapa *syar'u man qablana* bukan merupakan sumber hukum yang kuat, hal ini disebabkan kepada :

- 1) Pembeneran Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ketika ditanya atas dasar apa Mu'adz akan memutuskan hukum ketika menemui persoalan di Yaman kelak. Dan Mu'adz menjawab bahwa Ia akan mendasarkan hukum kepada al-quran, sunnah, ijma' dan ijtihad. Saat itu Mu'adz tidak menyebutkan Taurat, Injil ataupun *syar'u man qablana*. Dan pernyataan Mu'adz tersebut tidak dibantah oleh Rasulullah SAW.
- 2) Rasulullah SAW selalu menunggu wahyu ketika ada persoalan baru yang muncul. Seandainya memang Rasulullah SAW menjadikan *syar'u man qablana* sebagai sumber penetapan hukum, tentunya beliau tidak perlu menunggu wahyu.
- 3) Jika *syar'u man qablana* masih digunakan, maka generasi saat itu pasti diwajibkan mendalaminya kemudian menerapkannya, termasuk bagi generasi sabahat dan sesudahnya.
- 4) Kalangan umat Islam sudah memahami bahwa syari'at Nabi Muhammad SAW adalah penutup dan merombak seluruh ajaran syari'at nabi sebelumnya. Dan seluruh ajaran syari'at saat ini yang kita laksanakan adalah bersumber dari ajaran Nabi Muhammad SAW. (Hadi, 2018: 93)

b. Qaul al-Shahaby

Qaul al-Shahaby (pendapat para sahabat) termasuk kepada dalil yang mengandung perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Sama halnya dengan dua dalil diatas, sebagian ada

yang menyatakan *qaul al-shahaby* dapat dijadikan sebagai dalil dan sebagian lagi menyatakan tidak. Bahkan, sebagian ulama yang lain berpendapat, kalangan sahabat yang dapat diikuti pendapatnya sebagai hukum hanyalah Abu Bakar dan Umar, hal ini disandarkan pada sabda Nabi saw:

اقتدوا بالذين من بعدي

“Ikutilah pendapat orang-orang setelahku”

Imam al-Ghazali menolak *qaul al-shahaby* sebagai sumber hukum, dikarenakan sulit untuk menjamin kebenaran para sahabat. Mereka tentu berdeda dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW yang perkataannya berasal dari wahyu dan beliau adalah orang yang ma'shum. Sulit untuk menjadikan sebuah sumber hukum dari sesuatu yang masih mengandung kemungkinan untuk salah. Jika para sahabat juga termasuk golongan yang ma'shum, bagaimana mungkin akan terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Oleh karena itu, Imam al-Ghazali menolak *qaul al-shahaby* sebagai salah satu sumber hukum.

Sekalipun demikian, masih terdapat kalangan yang menjadikan *qaul al-shahaby* senabai sumber hukum apabila memenuhi syarat bahwa *qaul al-shahaby* itu sesuai dengan perkataan Nabi SAW dan dapat dibenarkan oleh akal, seperti perkataan sayyidah Aisyah ra. bahwa masa mengandung seorang wanita tidak lebih dari dua tahun. Maka pendapat ini dapat diterima karena bersumber dari Rasulullah SAW. Abdul Wahab Khalaf pun menyatakan bahwa *qaul al-shahaby* dapat menjadi dalil apabila tidak bertentangan dengan pendapat sahabat yang lain dan bukan merupakan hasil

ijtihad seorang sahabat saja (tidak bersumber dari Nabi SAW). (Bakar, 2019: 94)

c. Istishlah

Istishlah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan. Maslahat pada prinsipnya adalah sesuatu yang menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Namun Imam al-Ghazali mendefinisikan maslahat sendiri yaitu memelihara tujuan hukum Islam pada makhluk pada lima hal hal yakni; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Bentuk maslahat sendiri ada tiga macam, yakni sebagai berikut:

- 1) Suatu maslahat yang didukung oleh dalil syar'i dan ini dapat dijadikan hujjah. Seperti dalam contoh penetapan hukum keharam makanan atau minuman yang memabukkan, setelah diqiyaskan dengan khamar. Langkah ini dilakukan karena ada maslahat yang ingin dijaga oleh hukum tersebut, dari menjaga jiwa, akal, harta bahkan keturunan.
- 2) Suatu maslahat, namun tidak didukung oleh dalil syar'i, bahkan mungkin juga bertentangan dengan dalil itu. Dapat dipahami pada penetapan hukum kafarat bagi orang kaya yang berjima' di siang hari bulan Ramadhan. Baginya lebih opantas dikenai hukuman untuk berpuasa dua bulan berturut-turut, sekalipun uturan awal dari kafarat tersebut adalah memerdekakan budak. Hal ini dilakukan, karena terlalu mudah baginya untuk membayar memerdekakan budak. Namun sekalipun ada maslahat, secara zhahir ketetapan ini batal, karena bertentangan dengan nas. Menurut al-Ghazali, apabila pintu ini dibuka maka akan merobah semua ketentuan hukum

Islam dan nas-nas disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi.

- 3) Suatu masalah yang tidak didukung dalil syariat, namun tidak pula ada nas yang menentanginya. Masalah ini dikenal dengan *mashlahah mursalah*. (Hadi, 2018: 93)

Dari pemaparan bentuk-bentuk masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil yang jelas ditolak oleh Imam al-Ghazali dalam kitab al-Mustaṣfa ini adalah Istishlah jenis kedua. Dimana sekalipun suatu ketetapan itu mengandung masalah, namun tidak didukung dalil bahkan bertentangan dengan dalil. Dari fakta ini, sekali lagi terlihat bahwa Imam al-Ghazali sangat selektif dalam menentukan sebuah dalil yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

Dalam menjaga tercapainya tujuan syari'at di atas, atau yang biasa disebut *maqashid syari'ah*, masalah ini pun terbagi kepada tiga tingkatan, sebagai berikut:

a) *Kebutuhan Primer (Dharuriyah)*

Maslahat pada tingkatan ini wajib untuk dijaga, karena berisi kebutuhan pokok yang terkandung pada lima hal (*mabadi' al-khams* atau *dharuriyat al-khams*), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Contoh penerapannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perintah memerangi orang kafir yang berbuat kesesatan dan menghukum orang yang berbuat dan mengajak untuk berbuat bid'ah. Hal ini dalam rangka menjaga agama (*hifz al-Din*).
2. Perintah untuk melakukan qisash adalah dalam rangka menjaga jiwa (*hifz an-Nafs*).

3. Larangan untuk meminum minuman yang memabukkan dalam rangka menjaga akal (*hifz al-'aql*).

4. Kewajiban untuk menghukum orang yang berbuat zina adalah untuk menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*).

5. Pencegahan untuk merampas dan mencuri harta orang lain adalah dalam rangka menjaga harta yang merupakan kebutuhan untuk kehidupan dan penting bagi manusia (*hifz al-Mal*). (Al-Ghazali, 1992: 483)

b) *Kebutuhan Sekunder (Hajiyah)*,

Maslahat pada tingkatan ini adalah masalah yang mana jika tidak terpenuhi, maka tidak akan sampai merugikan keselamatan seseorang. Ia berbentuk solusi yang memudahkan dan melepaskan dari kesulitan. Contohnya adalah pemberian rukhsah dalam ibadah.

c) *Kebutuhan Pelengkap (Tahsiniyyah)*

Maslahat pada tingkat ini adalah masalah yang apabila tidak tercapai, maka tidak akan mengancam wujud salah satu dari lima kebutuhan pokok dan tidak pula menyebabkan kesulitan. Masalah ini seringkali dalam bentuk etika. (Fad, 2019: 135)

Dari ketiga tingkatan ini, disimpulkan bahwa Imam al-Ghazali tidak menjadikan masalah tingkat *hajiyah* (sekunder) dan *tahsiniyyah* (pelengkap) sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Hanya masalah pada tingkat *daruriyah* (primer) yang dapat dijadikan hujah dalam menetapkan sebuah hukum.

3. Istihsan dalam Kitab al-Mustaṣfa al-Ghazali

Al-Ghazali adalah pengikut mazhab Syafi'i yang menolak Istihsan, dengan

alasan bahwa melakukan Istihsan berarti seseorang telah membuat syariat sendiri dan berbuat sesuka hati. Apabila Istihsan dilakukan, maka orang yang tidak ahli pun dapat memberi syari'at (hukum) dan bisa jadi masing-masing orang akan mengeluarkan syari'at masing-masing. (Al-Zuhaily, 2006 : 30)

Pernyataan Imam Syafi'i yang menyebut bahwa orang yang memakai Istihsan adalah orang yang membuat syariat baru, pada dasarnya bermakna bahwa orang yang menggunakan Istihsan dan hal itu dilakukan semata-mata karena mengikuti hawa nafsunya sendiri, maka ia telah lancang berbuat seakan-akan ia seorang Nabi yang memiliki Syari'at (hukum). Namun, apabila ditelaah lebih dalam, jika Istihsan diartikan sebagai perbuatan seseorang yang berijtihad, kemudian ia berusaha untuk menggali dalil yang terbaik dari beberapa nas atau ia berusaha untuk mengambil satu dalil qiyas di antara beberapa qiyas, maka hal ini tidak ditolak oleh Imam al-Syafi'i. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i pada prinsipnya juga menggunakan Istihsan dalam menetapkan ketentuan hukum dari berbagai masalah, walaupun perbuatan itu tidak dengan sebutan *Istihsan* tapi dengan istilah *Qiyas*. Bagi Imam Syafi'i, persoalan hukum yang tidak tercantum secara detail penetapan hukumnya di dalam al-quran dan sunnah Nabi SAW, maka penetapan hukumnya dapat dicarikan dengan qiyas. (Noorwahidah, 2017: 18)

Setidaknya terdapat dua praktek yang diketahui bahwa Imam Syafi'i menggunakan metode Istihsan. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa dalam prakteknya ternyata Imam Syafi'i menggunakan cara kerja penetapan

hukum dengan metode ijtihad Istihsan, namun dalam segi penamaannya, Imam Syafi'i tidak menerima konsep penamaan Istihsan. Contoh tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktek Istihsan pada persoalan *mut'ah* (pemberian suami) bagi istri yang diceraikan oleh suaminya, Imam Syafi'i mengatakan:

فلأن الشافعي رضي الله عنه قال في باب المتعة أستحسن أن تكون ثلاثين درهما

"Saya menganggap baik (lebih tepat) untuk menetapkan *mut'ah* pemberian suami bagi istri yang dicerai yang tidak memiliki anak sebesar tiga puluh dirham".

2. Praktek Istihsan dalam muamalah, contoh praktik Imam Syafi'i yang menggunakan Istihsan adalah yang berkenaan dengan kasus *syuf'ah* (hak atas kepemilikan harta bersama atau kongsi), Imam Syafi'i menyatakan bahwa:

أستحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام

"Saya menganggap baik, jika orang yang memiliki kewenangan *syuf'ah* itu diberi waktu selama tiga hari". (Adam, 2021: 71)

Menerima atau menolak sesuatu tanpa memahaminya terlebih dahulu tentu mustahil. Maka di dalam kitab al-Mustaṣfa tersebut diuraikan beberapa makna Istihsan.

- 1) Istihsan adalah apa yang dianggap baik oleh seorang mujtahid sesuai dengan akalannya.

Maka dari pengertian ini, seseorang dapat menggunakan *Istihsan* didasarkan kepada penalaran akal semata secara *ta'abbudi* (mengikut saja). Bahkan pada prinsipnya, mengikuti sesuatu dengan *ta'abbudi* tidak dapat dilakukan apabila didasarkan pandangan akal semata, sebaliknya ia mesti diikuti apabila ada dalil. Hal ini disebabkan, apabila ingin

menjadikan Istihsan sebagai salah satu dalil seperti halnya al-quran, sunnah dan ijma'; maka mesti ada dalil terlebih dahulu, tidak bisa hanya berdasarkan kepada perkataan seseorang saja. Maka apabila menggunakan Istihsan tanpa dalil, maka tertolakhlah Istihsan tersebut. (Al-Ghazali, n.d.: 478)

Alasan penolakan Istihsan berikutnya adalah bahwa ulama terdahulu tidak ada yang berhukum berdasarkan hawa nafsu semata, tanpa berdasar kepada dalil. Apabila ijtihad tanpa dalil ini dilakukan, maka sama halnya dengan seseorang yang berijtihad buta. Tidak dapat orang buta berijtihad tanpa dalil, karena ia tidak akan bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Apabila disandarkan Istihsan kepada kecenderungan diri dan perasaan semata, maka kecenderungan atau kecondongan akal ini bisa dipengaruhi oleh satu di antara dua sebab ini, kalau tidak disebabkan condong karena dugaan semata atau condong karena ada dalil yang menyampaikan. Maka bagaimana mungkin seorang yang melakukan Istihsan hanya menyandarkan pendapatnya hanya pada dugaan semata tanpa dalil? Maka sekali lagi Istihsan tertolak. (A. H. Al-Ghazali, n.d. : 469)

Kelompok yang menggunakan Istihsan sebagai sumber hukum, bersandar kepada dalil Q.S Az-Zumar ayat 55 dan ayat 18 berikut :

- وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

"Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu (AL-Quran) dari Tuhanmu". (QS. Az-Zumar (39) : 55)

- الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

"(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antara mereka". (QS. Az-Zumar (39) : 18)

Imam al - Ghazali dalam kitabnya *al-Mustasfa* menyanggah pendapat kelompok yang memakai kedua ayat ini sebagai dasar *Istihsan*-nya. Karena menurutnya, mengikuti yang paling baik disini (احسن) adalah yang paling baik dari dalil yang telah diturunkan Allah, bukan yang paling baik menurut kecenderungan akal semata. Maka selanjutnya, lebih baik pula untuk membatalkan Istihsan. Kemudian penolakan selanjutnya, juga terdapat pada kelompok yang mendasarkan Istihsan kepada hadis berikut; (Al-Syaibani, n.d. : 379)

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو بكر ثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال : إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه و سلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ : إسناده حسن

Hadis ini tidak dapat dibantah. Karena pandangan baik disini adalah pandangan sekelompok orang, bukan perorangan. Ijma' adalah kesepakatan yang dapat menjadi hujah dan shahih. Sesungguhnya para sahabat Nabi SAW bersepakat untuk melarang berhukum kepada sesuatu yang tidak didasarkan pada dalil, karena hal itu syubhat dan hadis Mu'adz yang diutus ke Yaman pun tidak menyebutkan bahwa ia mendasarkan dalil dalam memutuskan

hukum kepada Istihsan. (Al-Ghazali, n.d. : 472)

Selain berdalil pada ayat dan hadis di atas kelompok yang memakai istihsan ini berdasarkan pada kebiasaan (*'urf*) berikut: Orang-orang memakai istihsan pada penggunaan kamar mandi umum yang kemudian dibayar dengan ketentuan perkiraan saja yang kira-kira cocok (*Istihsan*). Karena berapa kadar air yang dipakai tidak bisa dihitung dan kemudian dibayar dengan bayaran yang sesuai layaknya jual beli, yang jelas barang dan harganya.

Dari argument ini, al-Ghazali menjawab dengan dua hal:

- Dari mana orang yang mengaku melakukan Istihsan pada peristiwa tersebut mengetahui bahwa orang-orang yang melakukan hal di atas tanpa alasan dan dalil? Hal tersebut telah terjadi pada masa Rasulullah yang sulit untuk menghitung berapa kadar air yang diminum dari tempat minum umum dan begitu pula dengan hal kamar mandi umum, karena air yang terus tercurah dan sulit pula untuk menghitung berapa lama waktu di kamar mandi. Karena berbagai kesulitan tadi, maka muncullah *rukhsah*.
- Membayar air minum pada penjual air hukumnya mubah. Qarinahnya adalah apabila habis air yang diminum, maka wajib membayar sebagai gantinya. Apabila orang yang minum enggan membayar, maka penjual berhak memintanya.

Hal ini bukan berdasar pada nalar belaka, namun berdasarkan dalil. Dan begitu pula halnya dengan masuk kamar mandi tadi yang diqiyaskan pada air minum. Dari penjelasan contoh ini, Imam

al-Ghazali menitikberatkan bahwa perbuatan ini bukan didasarkan pada Istihsan, melainkan didasarkan kepada qiyas. Maka hukum ini bukan bid'ah dan buatan manusia semata, melainkan hasil dari qiyas dan qiyas adalah dalil hukum. (Al-Ghazali n.d. : 473)

2) Istihsan adalah dalil yang muncul dalam diri seorang mujtahid, yang ia tidak mampu menjelaskannya.

Pengertian ini jelas ganjil. Dalil yang muncul tanpa bisa dijelaskan, tentu tidak dapat diketahui apakah ia hanya khayalan atau benar-benar ada. Dalil itu mesti suatu nyata dan diambil dari dalil syari'at, sehingga tampak nyata apabila ia membenarkan atau menyalahkan. Dalam hal ini Imam Ghazali mencontohkan pendapat Abu Hanifah yang menggunakan Istihsan untuk menghukum seorang pezina yang dengan empat orang saksi, namun masing-masing melihat dari sudut yang berbeda. Padahal menurut hukum qiyas, pelaku tersebut tidak bisa dihukum. Imam al - Ghazali membantah pendapat ini, karena siapa pun tidak bisa menumpahkan darah seorang muslim tanpa alasan (*hujjah*) disebabkan tidak berkumpulnya persaksian empat orang atas seorang pezina pada satu tempat (sudut). Memang, mendustakan orang muslim adalah keji dan membenarkan mereka yang adil adalah baik. Namun mereka melihat dari empat sudut yang berbeda, lain halnya dengan mereka bersaksi dengan melihat dari empat rumah, karena jarak yang jauh. Seseorang tidak bisa mengingkari hukum yang sudah berdasarkan pada dalil, akan tetapi tidak bisa dinamakan sebagian dalil dengan sebutan Istihsan. (Al-Ghazali, n.d.: 475)

3) Beralihnya seorang mujtahid pada hukum suatu masalah karena ada dalil khusus dari al-quran.

Contohnya ada orang yang berkata “hartaku adalah untuk sedekah” atau “Demi Allah, aku akan bersedekah dengan hartaku”. Dalil qiyas menyatakan bahwa seseorang mesti bersedekah dengan apa saja yang dinamakan harta. Namun Abu Hanifah ber-Istihsan dengan mengkhususkan harta dengan harta zakat saja, karena ada dalil khusus dari al-Quran Q.S al-Taubah ayat 103 berikut:

خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Bagi Abu Hanifah, tiada harta yang dimaksud disini kecuali harta zakat. Hal ini memang tidak dapat diingkari. Namun yang menjadi masalah bagi Imam al-Ghazali dalam kitab al-Mustaşfa-nya adalah penamaan Istihsan pada kasus ini, padahal ia adalah “pengkhususan” dengan dalil. (Al-Ghazali, n.d.: 477)

4. Penolakan al-Ghazali Terhadap Istihsan dan Relevansinya Dalam Penetapan Hukum Masa Kini

Berdasarkan pemaparan isi dari literatur Syafi'iyah mengenai Istihsan yang diambil dalam kitab ushul fiqh Imam al-Ghazali kitab *Al-Mustaşfa*, dapat penulis simpulkan terdapat tiga alasan pokok yang menjadi alasan Imam al-Ghazali menggolongkan Istihsan sebagai dalil *mauhum* (dalil yang dikeragui) sebagai dasar penetapan hukum Islam. Alasan tersebut diambil Imam al-Ghazali dari merangkum pengertian Istihsan yang digunakan pada kalangan mujtahid. Kembali pada persoalan awal pada tulisan ini, bahwa

kalangan ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Istihsan. Apabila Istihsan dimaknai sebagai upaya mujtahid menetapkan suatu hukum dengan cara menduga-duga dengan akalanya mana dasar hukum yang baik karena melihat kepada situasi dan kondisi; bagi Imam al-Ghazali perbuatan ini tentu akan merusak tatanan hukum yang ada selama ini. Imam al-Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai upaya mujtahid dalam mengerahkan segala daya upaya dalam mencari sebuah ilmu dengan bersandarkan kepada hukum-hukum syari'at. (Faishal Agil Al Munawar and Mirwan 2020: 130) Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Imam Syafi'i bahwa haram hukumnya bagi seseorang yang memutuskan hukum dengan jalan Istihsan apabila ia menyalahi khabar (salah satu dari dalil syara', yakni al-quran, sunnah Rasulullah, ijma' dan qiyas).

Selanjutnya, selain karena perbuatan ini diistilahkan dengan *talazzuz* (melakukan sesuatu dengan seenaknya dan berdasarkan nafsu), Istihsan dalam konteks pengertian “dalil yang muncul dalam diri seorang mujtahid, yang ia tidak mampu menjelaskannya” ini tidak dapat dijadikan dalil bagi Imam al-Ghazali karena tidak nyata bentuknya. Dalil yang muncul tanpa bisa dijelaskan, tentu tidak dapat diketahui apakah ia hanya khayalan atau benar-benar ada. Dalil itu mesti suatu nyata dan diambil dari dalil syari'at, sehingga tampak nyata apabila ia membenarkan atau menyalahkan.

Dua model Istihsan ini, tentu tidak dapat digunakan sebagai model penetapan hukum saat ini. Namun model Istihsan terakhir yang dikemukakan

Imam al-Ghazali yakni “beralihnya seorang mujtahid pada hukum suatu masalah karena ada dalil khusus dari al-quran”, yang menurut Imam al-Ghazali sesungguhnya perbuatan itu disebut qiyas tentu bisa dilakukan oleh mujtahid saat ini. Karena dalam perkembangan zaman, tentu sangat banyak persoalan baru yang membutuhkan putusan hukum yang bisa jadi belum tercantum secara eksplisit dalam nas. Ijtihad yang dijadikan sebagai realisasi menuju pengembangan hukum saat ini, tentu selain berijtihad langsung kepada Al-Quran (*ijtihad istinbati*), perkembangan kenyataan yang ada pun tentu menjadi pertimbangan. Sehingga *ijtihad tatbiqi*, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan ketentuan hukum yang telah dihasilkan dari nas tersebut dapat menjadi pilihan. (Agus, 2014: 22)

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut;

1. Dalam permulaan kitab al-Mustashfa, Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa dasar hukum itu ada empat, yakni al-quran, sunnah Rasulullah SAW, Ijma' dan dalil akal dan *Istishab*. Imam al-Ghazali menyatakan dalil akal dan *Istishab* berada pada sumber dalil setelah ijma', dengan argumentasi bahwa pada dasarnya akal tidak dapat serta merta menjangkau hukum-hukum yang sudah menjadi nas, karena Imam al-Ghazali telah menegaskan bahwa satu-satunya asal hukum hanyalah satu, yakni berasal dari kitab Allah SWT. Bahkan sabda

Rasulullah SAW pun dikhabarkan dari wahyu Allah SWT.

2. Imam al-Ghazali adalah ulama dari kalangan Syafi'iyah yang teguh menyatakan bahwa Istihsan adalah dalil yang tertolak. Alasannya adalah karena Istihsan merupakan upaya mujtahid yang menduga-duga dengan akalnya, melihat kepada situasi dan kondisi. Bagi Imam al-Ghazali, perbuatan ini tentu akan merusak tatanan hukum yang ada selama ini. Dengan ber-*talazzuz* (seenaknya) seseorang dapat membuat syari'atnya sendiri dengan mendasarkan kepada dugaan akal dan perasaannya saja. Selain itu, dasar Istihsan apabila akan dijadikan dalil, tidak nyata bentuknya. Terakhir, apabila ada dalil yang digunakan dalam peralihan suatu hukum, menurut Imam al-Ghazali sesungguhnya perbuatan itu disebut qiyas, bukan Istihsan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). *Thabaqatus Syafi'iyah Ulama Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Adam, P. (2021). Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)*, 21(1), 68-79. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1208>
- Agus, M. (2014). Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qaradawi Dalam Pengembangan Hukum Islam. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(April 2014), 21.
- Al-Ghazali, A. H. (1992). *al-Mustashfa*. Madinah Munawwarah: Jamiah

Islamiyah.

Al-Ghazali, A. H. (1993). *Asas al-Qiyas li Abi Hamid al-Ghazali al-Syafi'i*. Maktabah al-Ubaikan.

Al-Subki, A. bin A. bin al-K. (n.d.). *Ibhaj fi Syarhil Minhaj*. Riyadh: Dar al-kutub al-Ilmiyyah.

Al-Syafi'i, M. bin I. (2005). *ar-Risalah*. Kairo: Maktabah Dar al-Turast.

Al-Syaibani, A. bin H. (n.d.). *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Kairo: Muassasah Qurtubah.

Al-Syatibiy, A. I. I. bin M. bin M. A.-L. (1997). *Al-Muwafaqat*. Saudi Arabia: Dar Ibnu Affan.

Al-Zuhaily, W. (2006). *Ushul Fiqih Islamiy*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Bakar, A. (2019). Konsep Pemahaman Pemikiran Hukum Islam Imam Al-Ghazali (Kitab Al-Mustashfa Bidang Sumber Hukum dalam Ushul Fiqih). *Jurnal Syariah Darussalam*, 4(2), 85-102.

Fad, M. F. (2019). Kontekstualisasi Maqashid Shari'ah Dalam Sustainable Development Goals. *Jurnal Iqtishad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 6(2), 130-155.

Fahlefi, R. (2012). Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Syariah (JURIS)*, 11(1), 22-32.

Faishal Agil Al Munawar, & Mirwan. (2020). Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 127-137. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.268>

Habibullah, E. S. (2016). Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(7), 454.

Hadi, S. (2018). Analisis Kitab Al-Mushtashfa Karya Al-Ghazali. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(1), 84-100.

Jainuddin. (2017). Istihsan; Analisis Historis Pemikiran Imam As-Syafi'i. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 1, 71-84.

Noorwahidah, N. (2017). Istihsan: Dalil Syara' Yang Diperselisihkan. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16(1), 13. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i1.1001>

Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqih II*. Jakarta: Prenada Media Group.